



Dampak *Open-Door Policy* Terhadap Peristiwa Krisis Diplomatik Tahun 2017 Hingga Keluarnya Dari OPEC Tahun 2018

Naomi Febri Christanti, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

After Sheikh Tamim was elected as Emir in Qatar in 2013, the open-door policy underwent a change. Sheikh Tamim defines open-door policy as a progressive and independent movement. Progressively, Sheikh Tamim strongly criticized the diplomatic crisis in 2017 imposed by the Gulf countries. Then independently, Sheikh Tamim decided Qatar to leave OPEC in 2018. In the Sheikh Tamim era, Qatar will carry out policies that focus on efforts to increase economic income diversification through LNG development and improve Qatar's image in the international scope after the diplomatic crisis in 2017. Furthermore, this research will try to answer the research problem regarding to, "Why did Qatar change its open-door policy in 2017-2018 during the leadership of Sheikh Tamim?". This study aims to explain how Sheikh Tamim's background, ideas and beliefs influenced the change in open-door policy and its application in the diplomatic crisis until its withdrawal from OPEC in 2018. This research uses a desk research method with an explanative type. This study uses a leader driven change framework to see how changes in foreign policy are influenced by leaders who have the authority to determine a policy.

Keywords: *Sheikh Tamim, open-door policy, diplomatic crisis, OPEC*

PENDAHULUAN

Menurut konstitusi 2003, kebijakan luar negeri Qatar didasarkan pada prinsip memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai *open-door policy*. Pada awalnya, Qatar masih bergantung pada pengaruh Arab Saudi pasca Pan-Arabisme, sehingga pembentukan *open-door policy* menjadi bentuk nyata dari kemandirian dalam kebijakan luar negeri. Penerapan dan perubahan dari kebijakan *open-door policy* kemudian dapat dilihat melalui transisi kepemimpinan dari Syekh Hamad menuju Syekh Tamim.

Open-door policy merupakan sebuah prinsip kebijakan disusun oleh seorang Emir bernama Syekh Hamad yang diartikan sebagai usaha untuk menjalin pertemanan melalui mediasi konflik (Khatib, 2013: 417-431). Tujuannya adalah untuk meningkatkan profil internasional dan menjalin persahabatan dengan pihak yang

berkonflik. Di tahun 2013, Syekh Hamad digantikan oleh anaknya, yaitu Syekh Tamim. Di bawah kepemimpinan Syekh Tamim, *open-door policy* mengalami perubahan. Perbedaan *open-door policy* antara Syekh Hamad dan Syekh Tamim terletak dalam penerapannya. Syekh Hamad mengartikannya sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan profil internasional Qatar melalui mediasi konflik, sedangkan Syekh Tamim mengartikannya sebagai sebuah sikap independen progresif (Kaussler, 2015: 2). Secara progresif, Syekh Tamim mengkritik adanya blokade politik maupun ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara di Teluk sedangkan secara independen, Syekh Tamim memutuskan Qatar untuk keluar dari OPEC sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya energinya sendiri.

Peran aktif Qatar dalam kaitannya dengan kebijakan luar negerinya berbeda antara satu sama lain. Pada pemerintahan Syekh Hamad, Qatar memainkan peran sebagai mediator konflik, namun hasil dari kebijakan tersebut tidak se-progresif masa pemerintahan Syekh Tamim. Dalam hal ini, Syekh Tamim memiliki pendekatan yang berbeda dengan mencoba tren baru yaitu meninggalkan nilai-nilai konservatisme negara-negara di Arab. Perubahan *open-door policy* merupakan implikasi dalam upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dari ayahnya, Syekh Hamad. Kebijakan *open-door policy* pada kepemimpinan Syekh Tamim kemudian memiliki fokus pada pentingnya kedaulatan, pengarusutamaan ekonomi dan pemberdayaan pemuda. Perubahan *open-door policy* memiliki implikasi terhadap adanya upaya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dari ayahnya, Syekh Hamad. Misalnya peristiwa krisis diplomatik pada tahun 2017, dimana Qatar harus menerima 13 tuntutan dari negara-negara Arab yang cukup destruktif dengan mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Krisis diplomatik ini muncul akibat adanya kecurigaan pada Qatar atas dukungannya pada Ikhwanul Muslimin, aliansi dengan Al-Jazeera dan kedekatannya dengan Iran. Pada akhirnya, pemerintahan Syekh Tamim melihat tekanan diplomatik yang terjadi menjadi peringatan terhadap kedaulatan Qatar yang terancam. Di tahun 2018, Qatar memutuskan untuk keluar dari OPEC (OPEC, 2018). Dalam lingkup produksi minyak di OPEC, Qatar hanya menyumbangkan kurang dari 2% produksi atau sekitar 600.000 barel perhari dibandingkan dengan Arab Saudi yang menyumbangkan 11 juta barel per hari (Baabood, 2017: 5). Kontribusi yang tidak sebanding ini menjadikan Qatar kurang mendapat keuntungan yang besar dibandingkan dengan negara anggota OPEC lainnya. Pada akhirnya, pemerintah Qatar melalui Saad Sherida Al-Kaabi sebagai Menteri Energi memutuskan untuk keluar sebagai suatu strategi pengembangan gas alam cair yang sudah ada sejak lama. Lebih lanjut, kedua peristiwa tersebut merupakan penerapan dari adanya kebijakan *open-door policy*.

Lebih lanjut, tulisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sumber bacaan rujukan. Beberapa sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Paul Salem berjudul “Qatari Foreign Policy: The Changing Dynamics of an Outsize Role” menjelaskan bahwa pada pemerintahan Syekh Hamad, kebijakan luar negeri Qatar lebih condong untuk mengupayakan proses mediasi konflik yang membawa imej netral (Salem, 2012: 1-10). Imej inilah yang mendorong Qatar mampu menjadi salah satu negara penting yang ada di kawasan. Selanjutnya, thesis yang ditulis oleh Krista Hurttala berjudul “Regional Balance of Power-Analyzing Cause Behind Qatar’s Diplomatic Crisis” (Hurttala, 2019: 26-27) dan jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Shireen Safa berjudul “The Impact of the GCC Boycott On Qatar Foreign Policy” (Wahyuni dan

Safa, 2018: 81) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Qatar telah mendorong krisis diplomatik 2017. Qatar telah mengubah prinsip mediasi menjadi intervensionis dan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keamanan dan memperkuat ekonomi. Hal ini kemudian terimplikasi dengan adanya penolakan 13 tuntutan dan pengembangan *LNG*.

Dari beberapa bacaan tersebut, terdapat kekosongan penelitian dalam aspek bagaimana dinamika yang ada dengan perubahan kebijakan di Qatar itu merupakan hasil atas perencanaan yang matang dari seorang pemimpin. Beberapa bacaan tersebut tidak menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Syekh Tamim, melainkan hanya menjelaskan bahwa Qatar mengubah prinsip mediasi hingga menyebabkan krisis diplomatik tahun 2017. Padahal pada 2013 Qatar sudah mengalami pergantian pemimpin. Melalui kekosongan tersebut, maka tulisan ini akan membawa faktor pembuat kebijakan atau *leader driven change* dari Syekh Tamim sebagai subjek analisis dalam memahami pemikiran, keyakinan dan latar belakangnya dalam kebijakan *open-door policy* pada rentang tahun 2017-2018.

PEMBAHASAN

Analisis Leader Driven Change dalam Pembentukan Kebijakan Open-Door Policy Qatar di Masa Kepemimpinan Syekh Tamim

Menurut aturan negara, Syekh atau Emir menjalankan fungsinya untuk menyusun kebijakan umum Negara dengan bantuan Dewan-Dewan Menteri yang ada hingga mengangkat perwakilan diplomatik maupun misi konsuler (Ministry of Foreign Affairs, 2013). Penyusunan *open-door policy* kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Emir di Qatar. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional maka pemerintah beserta elemen didalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati sejak tahun 2003 (Yetim, 2014: 395). Adanya pergantian pemimpin juga mendorong perubahan dalam prinsip yang ada di *open-door policy*. Dapat disimpulkan bahwa Syekh Tamim merupakan pemegang tertinggi seluruh hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di Qatar.

Berdasarkan analisis *leader driven change*, perubahan kebijakan luar negeri terjadi karena adanya latar belakang yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Hermann, 1990: 5). Dalam hal ini, perubahan *open-door policy* berkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh Syekh Tamim. Latar belakang ini yang kemudian menjadi ide dasar pembentukannya. **Pertama**, Syekh Tamim memiliki latar belakang militer dan politik yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan riwayat pendidikannya Royal Military Academy of Sandhurst di Inggris. Setelah lulus dari akademi militer tersebut, Syekh Tamim kemudian bergabung dengan Angkatan Bersenjata Qatar, yang merupakan gabungan dari studi akademis militer dan pengalaman praktis maupun lapangan tentara elit Qatar. Dengan latar belakang militernya ini, maka Syekh Tamim menjadi salah satu pemimpin yang memiliki perhatian besar pada kedaulatan dan keamanan negara. Selain itu, Syekh Tamim juga telah aktif dalam panggung politik di Qatar. Syekh Tamim pernah memimpin beberapa lembaga tinggi negara seperti Dewan Tertinggi Pendidikan, Dewan Tertinggi Kesehatan, Dewan Tertinggi Lingkungan dan Cagar Alam, Dewan Tertinggi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dewan Direktur Otoritas Investasi Qatar, Komite Tertinggi untuk Perencanaan Pembangunan, Dewan Pengawas Universitas Qatar, dan Pusat Kepemimpinan Qatar (BBC, 2013). Latar

belakang ini kemudian mendorong ide dasar bahwa *open-door policy* adalah perwujudan dari upaya meningkatkan diversifikasi pendapatan dan memperbaiki citra pasca krisis diplomatik 2017.

Kedua, Syekh Tamim merupakan pemimpin termuda di Qatar. Hal ini dibuktikan dengan usianya yang masih terhitung 33 tahun ketika diangkat menjadi seorang Emir. Dengan latar belakang tersebut, maka *open-door policy* merupakan suatu prinsip yang memiliki tujuan untuk mengubah Qatar menjadi masyarakat maju dengan salah satu penekanan pada pentingnya peran generasi muda dalam kemajuan negara. Pemberdayaan generasi muda juga akan mendorong sikap bangga terhadap negara. Salah satu perwujudan dari pemberdayaan generasi pemuda kemudian dapat dilihat dari adanya restrukturisasi kabinet seperti berikut:

Tabel 1. Daftar Menteri Baru Pada Kabinet Syekh Tamim di 2013

No.	Nama Pemegang Jabatan	Jabatan
1.	Syekh Abdullah bin Khalifa Al Thani	Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri
2.	Khalid bin Mohamed Al-Attiah	Menteri Luar Negeri
3.	Saad Sherida Al-Kaabi	Menteri Energi dan Industri
4.	Ali Sherif Al-Emadi	Menteri Keuangan
5.	Hessa Sultan Al Jaber	Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi

Sumber: (Ministry of Foreign Affairs Qatar, 2013) diolah oleh penulis

Susunan baru dalam kabinet Syekh Tamim akan mendorong implementasi *open-door policy* secara lebih matang. Dari 29 anggota Dewan Menteri yang dilantik, terdapat 4 Dewan Menteri dan 1 Perdana Menteri baru dalam susunan kabinet yang ada. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan luar negeri *open-door policy* yang disusun oleh Syekh Tamim akan dibantu oleh Syekh Abdullah bin Khalifa Al Thani sebagai Perdana Menteri dan Khalid bin Mohamed Al-Attiah sebagai Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, dalam hal pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan energi serta kerjasamanya akan membutuhkan bantuan dari Ali Sherif Al-Emadi sebagai Menteri Keuangan dan Saad Sherida Al-Kaabi sebagai Menteri Energi dan Industri. Ditambah dengan fakta turunnya Syekh Hamad bin Jassim, yang merupakan tangan kanan dari Syekh Hamad atau dimasukkannya perempuan dalam kabinet. Momentum perubahan kabinet dinilai merupakan perwujudan dari keinginan Syekh Tamim untuk memberdayakan kaum pemuda yang ada di Qatar

Ketiga, Syekh Tamim merupakan salah satu pemimpin yang terbilang aktif dalam kebijakan ayahnya sendiri seperti mediasi konflik atau penyusunan Visi Nasional 2030. Dengan latar belakang tersebut, maka perubahan *open-door policy* merupakan suatu usaha untuk melanjutkan dan memperbaiki kebijakan Ayahnya. Pada peristiwa pengangkatan menjadi Emir di 2013, Syekh Tamim menyatakan bahwa;

“Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan melanjutkan semangat untuk memajukan perekonomian nasional, mengembangkan pelayanan, membangun fasilitas umum, dan meningkatkan sektor pemuda maupun olahraga. Kita juga akan memberikan perhatian penuh terhadap investasi untuk generasi mendatang, dan mendiversifikasi sumber pendapatan Negara Qatar” (Government Communication Office, 2013).

Pernyataan tersebut menjadi gambaran dari bagaimana Syekh Tamim akan mengembangkan nilai-nilai yang ada di *open-door policy*. Penggunaan kata “melanjutkan semangat” oleh Syekh Tamim digunakan untuk menunjukkan reformasi dari *open-door policy* yang diusung oleh Syekh Hamad di rentang tahun 1995-2013. Melanjutkan semangat bukan berarti sebuah kegagalan, namun keinginan untuk meneruskan dan memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Selain itu, Syekh Tamim juga menambahkan hal-hal baru dalam ranah kebijakan luar negeri di Qatar, yaitu dalam sektor SDM dan pendapatan. Istilah-istilah tersebut kemudian menjadi pemantik dari gerakan independen progresif di Qatar pasca krisis diplomatik tahun 2017 hingga berujung keluarnya dari OPEC. Selain itu, Syekh Tamim juga menerima banyak penghargaan yang membanggakan. Misalnya di tahun 2016, Syekh Tamim menerima penghargaan Anti-Corruption Excellence Award, yang diberikan oleh *Rule Of Law and Anti-corruption Center (ROLACC)* karena perannya dalam mendukung mandat anti-korupsi (UNODC, 2016). Pencapaian-pencapaian dari Syekh Tamim ini yang telah mendorong kepercayaan sang Ayah untuk mengangkatnya menjadi seorang Emir.

Dampak Open-Door Policy Pada Krisis Diplomatik Tahun 2017 dan Keluarnya dari OPEC Tahun 2018

Menurut analisis *leader driven change*, perubahan *open-door policy* merupakan ide progresif Syekh Tamim yang menunjukkan kemandirian Qatar dalam kebijakan luar negeri. Beberapa hari setelah diangkat menjadi Emir, Syekh Tamim menyampaikan pidato mengenai gambaran dari kebijakan luar negeri yang akan diusungnya. Syekh Tamim menjelaskan bahwa:

“Kami adalah orang-orang yang berkomitmen pada prinsip dan nilai, sehingga menjadi negara yang independen merupakan sebuah fakta. Kami adalah orang-orang dengan visi. Kami juga menghormati semua tren politik yang ada. Kami menghormati keragaman aliran pemikiran dan menghormati semua agama di negara kita dan di luar negeri. Sebagai orang Arab, kami menolak adanya sektarianisme atau doktrin yang mencegah kemajuan ekonomi maupun modernisasi” (Blanchard, 2014: 1-2).

Sebagai agen utama perubahan *open-door policy*, Syekh Tamim menyatakan bahwa Qatar harus menghormati dan menjaga nilai-nilai yang memang sudah ada sejak lama. Sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh Barat, maka penting untuk menumbuhkan sikap bangga terhadap bangsa sendiri yang telah independen. Selain itu, walaupun Qatar tergolong sebagai salah satu negara kecil di Teluk, tetapi pertumbuhan penduduknya sudah cukup tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dari *The Guardian*, bahwa penduduk asli Qatar menempati sekitar 15% dari total populasi sedangkan 85% sisanya adalah orang asing atau imigran (The Guardian, 2013). Berbeda dengan Arab Saudi yang cenderung tradisional, Qatar juga menjadi salah satu negara yang mendukung adanya modernitas (Wardoyo, 2018: 87). Bentuk

dari modernitas ini tidak hanya bisa dilihat dari adanya kemajuan ekonomi, namun juga dalam hal pemikiran. Hal ini karena modernitas menjadi salah satu penggerak utama dalam kemajuan negara sejak kepemimpinan sang ayah yaitu Syekh Hamad. Upaya yang dilakukan Syekh Hamad tidak terbatas dalam upaya memajukan pembangunan saja, namun juga meningkatkan profil internasional Qatar. Dukungan Syekh Tamim terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin kemudian mendorong terjadinya peristiwa penarikan Duta Besar Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain di 2014. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh media pemerintah Saudi pada 5 Maret 2014, keputusan untuk menarik Duta Besar dibuat karena Qatar tidak mentaati *Riyadh Agreement* mengenai campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain yang menjadi poin penting kerjasama di Dewan Kerjasama Teluk hingga saat ini (Al-Jazeera, 2014). Dalam hal ini, dukungan terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin dapat mengganggu stabilitas kawasan dan urusan internal negara lain. Selanjutnya, di bulan November, perjanjian tersebut diperbarui dengan menyinggung tentang stabilitas di Mesir termasuk mencegah Al-Jazeera sebagai platform pemberitaan yang mendukung Presiden Mursi.

Lebih lanjut, *analysis leader driven change* juga menekankan bahwa perubahan kebijakan luar negeri terjadi karena adanya hasil dari interpretasi seorang pemimpin terhadap situasi dan kondisi eksternal. Dalam hal ini, Syekh Tamim merupakan salah satu pemimpin yang memiliki perhatian besar pada kedaulatan dan keamanan negara. Di awal berlangsungnya krisis diplomatik, Syekh Tamim menginterpretasikan bahwa fenomena ini merupakan skenario politik untuk mengancam kedaulatan Qatar. Dalam wawancara dengan *CNBC International* pada 2017, Syekh Tamim menjelaskan bahwa:

“Kedaulatan Qatar berada pada garis merah. Qatar tidak menerima adanya gangguan terhadap kedaulatan negara” (Al-Jazeera, 2017).

Penggunaan kata “garis merah” menjadi simbol kondisi kedaulatan Qatar yang telah diganggu dan sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi hubungan antar negara yang berselisih. Dengan latar belakang militernya, maka Syekh Tamim memahami betul bahwa kedaulatan adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh negara lain sesuai hukum internasional. Keyakinan dari Syekh Tamim merupakan kemampuan progresif Qatar untuk bisa lepas dari ketergantungan dengan Arab Saudi. Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa Arab Saudi dan sekutu mencoba mengambil kesempatan yang bertujuan melemahkan Qatar karena sedang berusaha untuk menjadi negara yang independen progresif. Pada akhirnya Qatar harus menerima sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kritik ini menjadi perwujudan dari open-door policy dalam hal kedaulatan.

Latar belakang krisis diplomatik kemudian menjadi catatan kelam dalam hubungan internasional antara Qatar dengan negara Teluk lainnya. Peristiwa ini kemudian berdampak pada keluarnya Qatar dari OPEC tahun 2018. Negara-negara yang terlibat dalam krisis diplomatik merupakan salah satu *founding fathers* dari keberadaan organisasi ini. Peristiwa keluarnya Qatar dari OPEC merupakan perwujudan dari prinsip open-door policy dalam aspek ekonomi. Keputusan Qatar untuk meninggalkan OPEC pada 2018 merupakan langkah strategis independen yang diwujudkan oleh Syekh Tamim dalam rangka meningkatkan produksi gas alam sebesar 43 persen menjadi 110 juta ton per tahun (Rudiany & Lubis, 2020: 104).

Sebelum keluar dari OPEC secara resmi, Qatar melalui Syekh Tamim sebenarnya telah menunjukkan sikap yang berbeda. Misalnya, Syekh Tamim yang

terlihat tidak menghadiri KTT ke-39 GCC di Riyadh (Anadolu Agency, 2018). Tindakan ini sangat disayangkan oleh pihak lain yang hadir mengingat Qatar adalah satu-satunya negara di Teluk yang secara aktif mengirim kepala negaranya dalam KTT GCC. Di Qatar, Emir adalah perwakilan dalam semua hal yang berkaitan dengan hubungan internasional. Ketidakhadiran Syekh Tamim dalam pertemuan tersebut menyiratkan tanda tanya besar bagi publik secara luas mengenai bagaimana masa depan energi Qatar dan keterkaitannya dengan open-door policy.

Dalam pidato pertama ketika diangkat menjadi Emir, Syekh Tamim menyampaikan hal sebagai berikut;

“Kita akan memberikan perhatian penuh terhadap investasi untuk generasi mendatang, dan mendiversifikasi sumber pendapatan Negara Qatar”
(Government Communication Office, 2013).

Diketahui bahwa keputusan Qatar untuk meninggalkan OPEC pada 2018 menjadi sebuah indikasi dari kebijakan Syekh Tamim untuk mengembangkan LNG (Liquefied Natural Gas). LNG sendiri adalah salah satu energi terbarukan yang pembakarannya lebih bersih daripada batu bara dan minyak. Menurut Syekh Tamim, pengembangan LNG akan mengurangi emisi gas yang menjadi penyebab globalisasi di era sekarang ini. Selain itu, pemilihan untuk mengembangkan LNG juga mampu mendobrak perekonomian Qatar secara keseluruhan, mengingat belum banyak negara yang aktif dalam sumber energi tersebut. Pernyataan tersebut juga menandakan bahwa kebijakan dari Syekh Tamim untuk keluar dari OPEC merupakan sebuah keyakinan bahwa kerjasama energi lebih memungkinkan terjadi diluar organisasi, dibandingkan tetap bertahan didalamnya. Langkah ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa penurunan harga minyak negara anggota OPEC sekitar 30% disebabkan oleh produksi minyak yang berlebihan di pasar pada 2014 (Bowler, 2015). Akibatnya Qatar harus menurunkan produksinya sebanyak 1,2 juta barel atau sekitar 5% total perhari agar harga minyak bisa stabil. Penurunan produksi ini kemudian berdampak pada perekonomian saat itu mengingat peran dan kontribusi Qatar di OPEC berkisar 2% atau 600.000 barel perhari. Pada akhirnya, Syekh Tamim sebagai pemimpin Qatar meyakini bahwa kontribusi yang tidak sebanding ini menjadikan Qatar kurang mendapat keuntungan yang besar dibandingkan dengan negara anggota OPEC lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang didapat oleh Arab Saudi dengan angka produksi harian yang besar, sehingga mendorong kebijakan di OPEC untuk mengutamakan keuntungannya sendiri.

Pengembangan LNG merupakan keputusan strategis Syekh Tamim untuk mengembangkan gas daripada minyak sebagai tulang punggung kebijakan energi nasional. Menurut data yang dikeluarkan oleh *BP Statistical Review of World Energy*, Qatar merupakan negara eksportir LNG terbesar di dunia. Peningkatan nilai produksi terlihat dari yang awalnya hanya sebesar 19,6 *billion cubic meters* menjadi sebesar 175.5 *billion cubic meters* di tahun 2018 (BP Statistical Review of World Energy, 2019). Ditinjau dari sisi produksi, LNG memang memiliki prospek yang baik. Lalu, menurut Bank Dunia, Qatar memiliki pendapatan perkapita sebesar \$128,050, dibandingkan dengan Uni Emirat Arab sebesar \$74.410 atau AS sebesar \$60.200 (World Bank, 2020). Lebih lanjut, kebijakan luar negeri yang berfokus pada ekonomi telah membawa Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan pendapatan perkapitanya.

Sebagai agen utama perubahan *open-door policy*, Tamim memiliki keyakinan lainnya bahwa pengembangan LNG akan mengurangi emisi gas yang menjadi

penyebab globalisasi di era sekarang ini. Selain itu, pemilihan untuk mengembangkan *LNG* juga mampu mendobrak perekonomian Qatar secara keseluruhan, mengingat belum banyak negara yang aktif dalam sumber energi tersebut. Syekh Tamim memiliki keyakinan bahwa pendekatan alternatif sumber energi yang ramah lingkungan tentu akan menarik perhatian dunia internasional. Menurutnya, pengembangan energi ramah lingkungan akan menjadi sebuah jalan untuk mencapai tujuan yaitu memperkuat posisi Qatar sebagai pemasok *LNG* terkemuka di dunia. Pengembangan energi dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang bersifat jangka panjang, mengingat *LNG* merupakan salah satu sumber pendapatan di Qatar yang sudah ada sejak lama. Pada sidang Dewan Shura ke-47, Syekh Tamim menyampaikan bahwa:

“Qatar Petroleum akan berpartisipasi aktif dalam eksplorasi dan produksi LNG di luar negeri. Qatar akan menandatangani perjanjian dengan Oman, Brazil, Meksiko, Argentina, Afrika bahkan bermitra dengan perusahaan minyak internasional” (Amiri-Diwan, 2018).

Di kepemimpinan ini, Syekh Tamim telah meletakkan kerjasama baru sebagai pendorong keterbukaan Qatar dalam diversifikasi pendapatan ekonomi. Rencana pengembangan yang baru akan berfokus pada *LNG* atau gas alam cair. *LNG* adalah gas alam yang didinginkan dengan suhu tertentu, dan memiliki karakteristik lebih ramah lingkungan. Kerjasama baru yang dilakukan kemudian meliputi beberapa negara yang disebut sebagai *LNG Market* bagi Qatar. Misalnya, pengiriman *LNG* menggunakan kapal pengangkut ke negara-negara di Amerika Selatan. Kerjasama ini telah menghasilkan adanya adanya 5 terminal, yang tersebar di Brazil, Chili dan Argentina (Ulrichsen, 2018). Syekh Tamim memiliki keyakinan bahwa pendekatan alternatif sumber energi yang ramah lingkungan tentu akan menarik perhatian dunia internasional. Syekh Tamim sendiri merupakan salah satu pemimpin yang memiliki kepedulian besar terhadap ekonomi, sehingga ia meyakini bahwa untuk menjadi bangsa yang maju, maka keterbukaan terhadap cara baru untuk mendiversifikasi pendapatan harus dilakukan. Kepemimpinan Syekh Tamim telah mendorong adanya kesepakatan energi baru dengan mitra di seluruh dunia, termasuk China, Rusia, Jepang dan Inggris, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Qatar tetap terbuka untuk bisnis.

Pengembangan *LNG* merupakan salah satu poin pembahasan utama Visi Nasional 2030 (Amiri Diwan, 2017). Sebagai pihak penyusun utama dari visi tersebut, maka Syekh Tamim membawa pengembangan *LNG* dalam dua kategori utama yaitu, pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi berkelanjutan akan diwujudkan melalui pengembangan *LNG*. Selanjutnya, dalam pembangunan lingkungan, Qatar akan berusaha mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan.. Menurut sebuah penelitian, *LNG* adalah gas alam cair yang metode pencairannya paling ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi atau batubara (Statista, 2019). Dengan begitu, pemberdayaan *LNG* merupakan kemampuan strategis dari Syekh Tamim dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Qatar sekaligus mengembangkan sumber daya energi utama.

KESIMPULAN

Kebijakan *open-door policy* merupakan hasil dari keyakinan dan pemikiran seorang Emir. Sebelum terpilih menjadi seorang Emir, Syekh Tamim terbilang sangat aktif dalam dunia militer, ekonomi bahkan politik di Qatar. Kecakapannya ini yang kemudian mendorong adanya sikap independen progresif. Secara progresif, Syekh Tamim sebagai pemegang seluruh hubungan internasional Qatar melakukan kritik terhadap adanya blokade politik maupun ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara di Teluk. Sebagai negara terdampak, Syekh Tamim meyakini bahwa kedaulatan dan kebebasan berpihak adalah hak negara berdaulat, mengingat Qatar sedang berusaha untuk terlepas dari pengaruh Arab Saudi. Selain itu, secara independen, Syekh Tamim memutuskan Qatar untuk keluar dari OPEC pada 2018. Di dalam OPEC, Qatar merupakan negara dengan kontribusi produksi terkecil, sehingga keputusan dalam organisasi lebih banyak dipengaruhi negara dengan kontribusi besar seperti Arab Saudi. Keputusan untuk keluar dari OPEC dilatarbelakangi oleh Syekh Tamim yang memiliki pemikiran bahwa bertahan di OPEC tidak membawa keuntungan bagi masa depan energi di Qatar, sehingga pengembangan LNG kemudian menjadi prioritasnya. Secara lebih lanjut, pengembangan LNG merupakan implementasi dari *open-door policy* yang tercantum dalam Visi Nasional 2030. Syekh Tamim meyakini bahwa dengan mengembangkan LNG maka akan mampu mendobrak perekonomian di Qatar, membuka jalur hubungan dengan negara-negara diluar kawasan Teluk dan membantu perlindungan lingkungan.

Perubahan kebijakan luar negeri di Qatar merupakan hasil dari peran besar seorang pemimpin. Penelitian ini telah memberikan gambaran bagaimana Syekh Tamim sebagai agen utama kebijakan luar negeri yang berperan penting dalam perubahan *open-door policy* di Qatar tahun 2013. Analisis *leader driven change* telah mampu memberikan penjelasan mengenai bagaimana pemikiran, keyakinan serta latar belakang dari Syekh Tamim mempengaruhi pembentukan hingga pengaplikasian dari *open-door policy*. Jika dalam penelitian ini perubahan kebijakan dilatarbelakangi oleh pemimpin, maka penelitian lebih lanjut dapat menganalisis faktor lainnya yang juga memberikan kontribusi terhadap perubahan tersebut. Berbeda dengan analisis penelitian ini yang lebih menekankan pada pemikiran dan keyakinan seorang pemimpin, maka saran untuk penelitian selanjutnya bisa melibatkan tipe kepemimpinan tersebut. Tipe kepemimpinan dapat digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan pembuat kebijakan atau pemimpin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing 2 dan Satwika Paramasatya, SIP.,M.A. selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Amiri Diwan. (2014). Qatar National Vision 2030. Diambil dari https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatar-national-vision-2030?sc_lang=en [Diakses pada 20 Januari 2022]
- Amiri-Diwan. (2018, November 6). HH The Amir Speech at the Opening of the 47th Advisory Council Session. Diambil dari <https://www.diwan.gov.qa/briefing->

- room/speeches-and-remarks/2018/november/6/47th-advisory-council [Diakses pada 22 Februari 2022]
- Anadolu Agency. 2018. 39th Gulf Cooperation Council summit ends in Riyadh. Diambil dari <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/39th-gulf-cooperation-council-summit-ends-in-riyadh/1333966> [Diakses pada 2 Februari 2022]
- BBC. (2014, March 5). Gulf ambassadors pulled from Qatar over 'interference'. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26447914> [Diakses pada 2 September 2021]
- BBC. (2013, June 25). Qatari emir Sheikh Hamad hands power to son Tamim. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23026870> [Diakses pada 12 September 2021]
- Blanchard, C. M. (2014). Qatar: Background and US Relations. CRS Report.
- Bowler, T. (2015, Januari 19). Falling oil prices: Who are the winners and losers?. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/business-29643612> [Diakses pada 1 Februari 2022]
- GCO. (2013). The Inaugural Speech Of His Highness On Becoming The Emir Of Qatar. Diambil dari <https://www.gco.gov.qa/en/speeches/the-inaugural-speech-of-his-highness-on-becoming-the-emir-of-qatar/> [Diakses pada 15 Januari 2022]
- Hermann, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 34(1), 5.
- Hurttila, K. (2019). Regional Balance of Power-Analyzing Causes Behind Qatar's Diplomatic Crisis. 26-27.
- Jian, S. (1996). *Foreign Policy Restructuring as Adaptive Behavior: China's Independent Foreign Policy 1982-1989*. New York: University Press of America.
- Kaussler, B. (2015). Tracing Qatar's foreign policy prajjectory and its impact on regional security. *Arab Center for Research and Policy Studies*, 2.
- Khatib, L. (2013). Qatar foreign policy: the limits of pragmatism. *International Affairs*, 89(2), 417-431
- MOFA. 2013. Foreign policy Principles. Diambil dari <https://www.mofa.gov.qa/en/foreign-policy/principles> [Diakses pada 10 Januari 2022]
- MOFA. 2013. Qatar Political System. Diambil dari <https://www.mofa.gov.qa/en/qatar/political-system/general-information> [Diakses pada 07 Januari 2022]
- Nugroho, R. (2021). *Foreign Policy ; Menuju Kebijakan Luar Negeri Level 4*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- OPEC. (2018). Qatar gives notice of its withdrawal from OPEC. Diambil dari https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5261.htm [Diakses pada 1 Februari 2022]
- Rudiany, N. P., & Lubis, F. R. (2020, Januari). Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar untuk Mengakhiri Keanggotaan dalam OPEC. *Hubungan Internasional*, 13(1), 104.
- Salem, P. (2012, Desember 31). Carnegie Europe. Diambil dari <https://carnegie-mec.org/2012/12/31/qatari-foreign-policy-changing-dynamics-of-ousize-role-pub-50967> [Diakses pada 20 Februari 2022]
- The Guardian. (2018, September 1). Saudi Arabia may dig canal to turn Qatar into an island. Diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/01/saudi->

- arabia-may-dig-canal-to-turn-qatar-into-an-island [Diakses pada 13 September 2021]
- Ulrichsen, K. (2018). Why Is Qatar Leaving OPEC?. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2018/12/10/opinion/qatar-leaving-opec-saudi-arabia-blockade-failure.html> [Diakses pada 22 Februari 2022]
- UNODC. (2016, Oktober 5). Nominations now open for the 2016 Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Anti-Corruption Excellence Award. Diambil dari <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/October/nominations-now-open-for-the-2016-sheikh-tamim-bin-hamad-al-thani-anti-corruption-excellence-award.html> [Diakses pada 6 Maret 2022]
- Wahyuni, S. & Safa, Shireen. (2018). The Impact of the GCC Boycott On Qatar Foreign Policy. *Transformasi Global*, 4, 81.
- Wang, T. (2019). Natural gas production in Qatar 1998-2020. Diambil dari <https://www.statista.com/statistics/265336/natural-gas-production-in-qatar/> [Diakses pada 1 Maret 2022]
- Wardoyo, B. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 87
- World-Bank. (2020). GNI per capita, PPP (current international \$) - Qatar. Diambil dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=QA> [Diakses pada 20 Januari 2022]
- Yetim, M. (2014). State-led Change in Qatar in the Wake of Arab Spring: Monarchical Country, Democratic Stance? *Contemporary Review of Middle East*, 1(4), 395.